



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NAMA : Drs. ARSAN LATIF, M.Si
N I P : 19690331 198908 1 001
KELAS : B
N D H : 10

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
EVALUASI RANPERDA APBD BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Sebagai upaya dalam melakukan pembinaan keuangan daerah maka Kemendagri diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi Ranperda APBD Provinsi yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah sedangkan Pemerintah Provinsi diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi Ranperda APBD Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan evaluasi Ranperda APBD penulis menemukan permasalahan serius yang memerlukan pembenahan. Pelaksanaan evaluasi selama ini kurang efektif dalam menjaga agar APBD efektif dan efisien. Proses evaluasi Ranperda APBD yang dilakukan saat masih dilakukan secara manual, dimana evaluator anggaran mengecek dan menganalisis dokumen fisik Ranperda APBD dari daerah dan menyandingkan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemda mengirimkan dokumen fisik Ranperda APBD, KUA, PPAS untuk kemudian dilihat satu persatu oleh evaluator sebelum kemudian diberikan pandangan terhadap Ranperda APBD tersebut. Dengan metode ini, para evaluator kesulitan untuk mengidentifikasi jika terjadi duplikasi anggaran dan inefisiensi anggaran. Selain itu dengan metode yang manual tersebut, evaluator anggaran diharuskan untuk bertemu dengan penyusun anggaran (Pemda) yang meningkatkan aspek subjektivitas yang berpengaruh pada hasil evaluasi. Sebagai respon dari permasalahan tersebut, penulis mengajukan proyek perubahan berupa penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses evaluasi tim evaluasi anggaran di Kemendagri dengan mengajukan sistem e-evaluation.

Proyek ini bertujuan membangun sistem aplikasi e-evaluation yang digunakan untuk melakukan evaluasi Ranperda APBD Provinsi agar evaluasi Ranperda APBD berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam jangka pendek, proyek ini menghasilkan 3 (tiga) output yaitu: 1) Aplikasi *e-evaluation*; 2) instrument evaluasi Ranperda APBD (kertas kerja) dan 3) Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan Evaluasi.

Untuk melaksanakan proyek perubahan tersebut, penulis telah melakukan beberapa langkah-langkah strategis yang terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan.

Pada tahap ini penulis melakukan konsultasi dengan mentor, pendekatan dengan stakeholders untuk mendapatkan dukungan dari stakeholders terkait, pembentukan tim pelaksana di lingkungan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah serta koordinasi dengan instansi/komponen terkait yang dilakukan pada bulan Maret - April 2019.

2. Tahap penyusunan instrument dan SOP.

Tahap kedua adalah penyusunan instrument dan SOP yang dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk. Tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam melakukan evaluasi Ranperda APBD kemudian menyusun draft instrument evaluasi dan draft SOP berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada. Proses penyusunan ini dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2019

3. Tahap pengembangan aplikasi e-evaluation.

Memperhatikan instrument evaluasi dan SOP yang ada tim mengembangkan aplikasi berbasis server yang dapat digunakan untuk menarik data APBD dari format excel menuju data server sehingga interaktif. Instrumen (kertas kerja) yang dibangun kemudian di masukkan ke dalam sistem. Proses pengembangan ini dilakukan bulan Mei dan Juni 2019.

4. Tahap pelaksanaan.

Setelah instrument, SOP dan aplikasi telah selesai, maka instrument tersebut akan diujicoba dan di evaluasi untuk disempurnakan dan akan digunakan untuk melakukan evaluasi Ranperda APBD 2020 yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019.

Dari langkah tersebut saat ini telah tersusun instrumen evaluasi Ranperda APBD (kertas kerja), SOP evaluasi Ranperda APBD dan aplikasi e-evaluation. Secara umum pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan dengan baik meskipun belum mencapai 100 persen dalam implementasinya. Kendala utama dari pelaksanaan proyek ini adalah bahwa proyek ini akan diintegrasikan dengan pembangunan e-planning dan e-budgeting yang sedang dalam progress sehingga tidak bisa secara penuh mandiri. Dengan masih menunggu aplikasi e-planning dan e-budgeting di tetapkan, instrumen dan SOP masih belum dapat di masukkan ke dalam aplikasi. Untuk sementara, aplikasi e-evaluation ini akan berdiri sendiri sampai aplikasi e-planning dan e-budgeting telah selesai di bangun. Terhadap kendala tersebut, kami merekomendasikan agar sistem e-planning dan e-budgeting segera di sempurnakan dan kemudian aplikasi e-evaluation ini dapat di integrasikan. Kami juga merekomendasikan agar setelah itu dilakukan bimbingan teknis untuk para evaluator dalam mengoperasikan sistem.